



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN TOILI

2025

PROFIL KECAMATAN TOILI

KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan Profil Kecamatan Toili Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan dokumen profil ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan Toili, serta sejauh mana program-program yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di dalamnya termuat gambaran umum mengenai kondisi geografis, demografis, serta aspek kelembagaan dan tata kelola Pemerintahan Kecamatan Toili secara menyeluruh.

Profil ini disusun secara sistematis, efektif, efisien, dan akuntabel, dengan harapan dapat memudahkan pemahaman masyarakat, pemangku kepentingan, maupun pihak-pihak terkait dalam menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui dokumen ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman bersama atas capaian, tantangan, serta potensi yang dimiliki Kecamatan Toili.

Akhir kata, semoga Profil Kecamatan Toili Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat, baik sebagai bahan evaluasi maupun sebagai dasar perencanaan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

Cendana, Juni 2025
CAMAT TOILI



ANDI RUSTAM D.J. HI. PETTASIRI, SSTP, M.Si
NIP. 19840610 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Keluaran	1
4. Sistematika Penyusunan.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM	3
1. Sejarah Kecamatan Toili	3
2. Kondisi Umum.....	4
BAB III.....	11
PEMERINTAH KECAMATAN	11
1. Visi dan Misi	11
2. Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan	11
3. Tugas Pokok dan Fungsi	12
4. Strutur Organisasi.....	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kecamatan Bunta adalah Kota Tertua yang ada di Wilayah Kabupaten Banggai dan terbentuk pada Tahun 1965 pada masa pemerintahan R. Atje Slamet. Wilayah Kecamatan Bunta salah satu wilayah yang memiliki etnik atau Suku Loinang. Suku Loinang adalah salah satu suku yang menempati wilayah Bunta bagian pegunungan. Etnik atau Suku tersebut adalah suku terbanyak yang hidup di Kabupaten Banggai umumnya dan Kecamatan Bunta khususnya. Selain etnik atau suku Loinang, Kecamatan Bunta terdapat berbagai macam etnik yang saling berinteraksi, salah satunya adalah etnik Bugis yang pertama masuk ke wilayah Kecamatan Bunta.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan utama dari penyusunan Profil Kecamatan Toili adalah untuk menyediakan sebuah dokumen yang memuat data dan informasi mendasar mengenai kondisi aktual Kecamatan Toili secara menyeluruh. Informasi yang disajikan mencakup berbagai aspek penting, seperti keadaan umum wilayah, ketersediaan dan kondisi sarana serta prasarana, situasi perekonomian, potensi sumber daya lokal, serta struktur dan kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan. Seluruh data ini dirangkum secara sistematis dan disajikan dalam bentuk naratif dan visual melalui Profil Kecamatan serta Peta Kecamatan Toili. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai karakteristik wilayah Kecamatan Bunta sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.

3. Keluaran

Hasil atau keluaran dari penyusunan Profil Kecamatan Toili adalah tersusunnya sebuah dokumen yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi objektif Kecamatan Toili. Gambaran tersebut mencakup berbagai bidang penting, antara lain aspek kependudukan seperti jumlah dan komposisi penduduk, kondisi dan distribusi sarana serta prasarana publik, dinamika dan struktur perekonomian lokal, potensi unggulan yang dapat dikembangkan, serta kondisi kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

4. Sistematika Penyusunan

Laporan Profil Kecamatan Toili disusun secara sistematis dan terstruktur ke dalam 4 (empat) bab utama, yang masing-masing membahas aspek-aspek penting terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kondisi wilayah Kecamatan Toili, sistematika penyusunan adalah sebagai berikut:

a. Daftar Isi

Daftar isi adalah bagian dari suatu dokumen, buku, atau karya tulis yang memuat urutan judul bab, subbab, atau bagian penting lainnya lengkap dengan nomor halamannya. Fungsinya adalah untuk memudahkan pembaca menemukan dan menavigasi isi dokumen dengan cepat.

b. Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan umum mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, serta hasil dan sistematika yang diharapkan dari dokumen ini. Bab ini memberikan landasan konseptual sebagai pijakan awal bagi pembaca untuk memahami konteks penyusunan profil.

c. Bab II: Gambaran Umum Kecamatan Toili

Bab ini menyajikan deskripsi menyeluruh mengenai kondisi faktual wilayah Kecamatan Bunta, mencakup aspek sejarah, letak geografis, topografi, kondisi demografi, infrastruktur dan prasarana yang tersedia, keadaan perekonomian masyarakat, serta pembagian wilayah administrasi pemerintahan. Selanjutnya,

d. Bab III: Pemerintahan Kecamatan Toili

Bab ini secara khusus mengulas mengenai aspek kelembagaan pemerintahan, termasuk visi dan misi yang diemban, struktur organisasi yang berlaku, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan. Sistematika ini dirancang agar pembaca dapat memperoleh informasi secara runtut, mudah dipahami, dan menyeluruh mengenai Kecamatan Toili.

e. Daftar Pustaka

Daftar pustaka adalah bagian akhir dari karya tulis yang memuat daftar referensi atau sumber-sumber yang digunakan penulis dalam menyusun tulisannya. Daftar ini mencantumkan informasi seperti nama penulis, judul, tahun terbit, dan penerbit, dengan tujuan memberikan penghargaan kepada sumber dan memudahkan pembaca menelusuri informasi lebih lanjut.

BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Kecamatan Toili

Kecamatan Toili, yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki sejarah panjang yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan transmigrasi nasional. Sejak awal tahun 1970-an, wilayah ini menjadi salah satu lokasi prioritas program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mendistribusikan persebaran penduduk dari Pulau Jawa dan Bali ke kawasan luar Jawa yang masih memiliki ketersediaan lahan pertanian luas dan potensi sumber daya alam yang tinggi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2015).

Pada masa itu, Kecamatan Toili masih merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Batui. Dalam konteks pembangunan wilayah, kebijakan transmigrasi tidak hanya bertujuan untuk pemerataan penduduk, tetapi juga untuk mengembangkan kawasan terpencil agar dapat menjadi sentra ekonomi baru. Sejak gelombang pertama transmigran yang datang pada tahun 1973, berbagai desa dibuka dan dikembangkan, seperti Cendana Putih, Tirta Kencana, Moilong, dan Tanah Abang. Mereka membuka lahan pertanian, mendirikan infrastruktur dasar, dan secara bertahap membentuk masyarakat baru yang heterogen namun solid secara sosial (Husain, 2020).

Perkembangan pesat kawasan Toili menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1990-an, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk memekarkan Kecamatan Batui dan membentuk Kecamatan Toili sebagai entitas administratif baru (BPS Kabupaten Banggai, 2023). Pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan lokal. Sejak saat itu, Kecamatan Toili berkembang pesat menjadi salah satu wilayah terpenting di Kabupaten Banggai, baik dari sisi pertanian, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor migas dan pertambangan.

Namun demikian, luas wilayah Toili yang mencapai lebih dari 760 km² serta jumlah desa yang cukup banyak menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal distribusi layanan dan pembangunan yang merata. Menjawab tuntutan masyarakat dan rekomendasi dari pemerintah kabupaten, maka pada tahun 2023 dilakukan pemekaran wilayah, yang melahirkan Kecamatan Toili Jaya (Pemerintah Kabupaten Banggai, 2023). Kecamatan baru ini mencakup 10 desa dan berpusat di Desa Tolisu, dengan jumlah penduduk lebih dari 4.800 kepala keluarga. Pemekaran ini dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan menciptakan pemerataan sosial-ekonomi di kawasan selatan Banggai.

Saat ini, Kecamatan Toili dan Kecamatan Toili Jaya terus berkembang dan menjadi kawasan

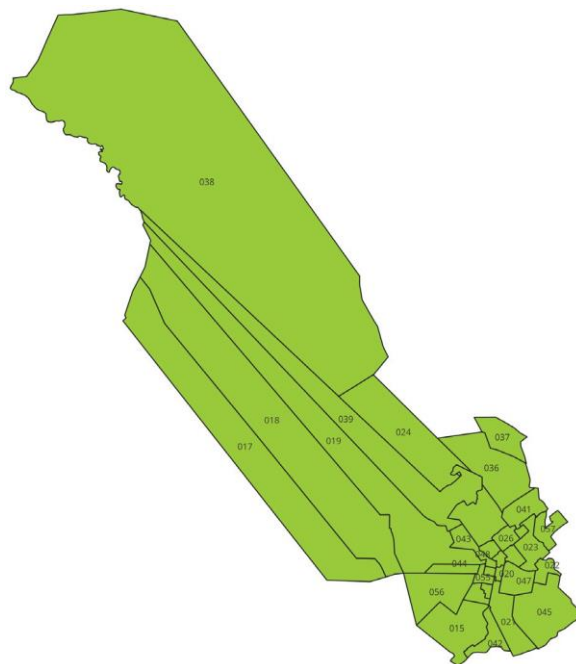
strategis di Sulawesi Tengah, khususnya dalam hal ketahanan pangan, investasi perkebunan, dan penyediaan sumber energi. Sejarah panjangnya yang dimulai dari kawasan hutan belantara yang ditempati oleh para transmigran, hingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, menjadikan Toili sebagai contoh nyata keberhasilan integrasi kebijakan nasional, inisiatif lokal, dan semangat masyarakat dalam membangun daerah.

2. Kondisi Umum

a. Kondisi Geografis

Secara topografis dan administratif, wilayah Kecamatan Toili memiliki karakteristik yang dapat dianalisis lebih lanjut melalui representasi visual yang disajikan dalam bentuk peta di bawah ini:

Gambar 1
Peta Wilayah Kecamatan Toili



Sumber: BPS Kabupaten Banggai

Luas wilayah Kecamatan Toili adalah berkisar 358,35 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Nuhon
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Moilong dan Kecamatan Batui Selatan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Toili Barat dan Teluk Tolo
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Toili Barat dan Kecamatan Toili Jaya

Informasi mengenai pembagian luas wilayah yang terdapat di Kecamatan Toili dapat disajikan secara lebih jelas melalui tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 1
Luas Wilayah Desa dan Kelurahan Kecamatan Toili

Desa/Kelurahan	Luas Total Area (km2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Ue Mea	107,00	14,05
Samalore	91,86	12,07
Sidomukti	1,32	0,60
Mansahang	4,50	0,59
Benteng	4,76	0,63
Rusa Kencana	109,03	14,32
Cendana Pura	1,62	0,21
Kel. Cendana	2,48	0,33
Tanah Abang	3,89	0,51
Singkoyo	7,50	0,99
Jaya Kencana	5,06	0,66
Sentral Sari	4,95	0,65
Sentral Timur	6,05	0,79
Tirta Kencana	4,09	0,54
Tirta Sari	4,14	0,55
Jumlah	358,35	46,49

Sumber: BPS Kabupaten Banggai

b. Kondisi Demografi

1) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa dan Kelurahan di Kecamatan Toili totalnya mencapai 22.194 Jiwa dengan presentase jenis kelamin yang tidak jauh berbeda. rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa dan Kelurahan Kecamatan Toili

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Ue Mea	294	268	562
Samalore	647	624	1.271
Sidomukti	222	208	430
Mansahang	498	486	984
Benteng	331	300	631
Rusa Kencana	1.326	1.258	2.584
Cendana Pura	982	932	1.914
Kel. Cendana	986	973	1.959
Tanah Abang	635	658	1.293
Singkoyo	968	955	1.923
Jaya Kencana	566	543	1.109
Sentral Sari	755	781	1.536
Sentral Timur	1.009	935	1.944
Tirta Kencana	778	775	1.553
Tirta Sari	758	743	1.501
Jumlah	11.755	10.440	22.194

Sumber: BPS Kabupaten Banggai

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laku-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 9 tahun	1.766	1.663	3.429
10 – 19 tahun	1.811	1.777	3.588
20 – 59 tahun	6.231	6.077	12.308
60 +	1.245	1.624	2.869
Total	11.053	11.141	22.194

Sumber: BPS Kabupaten Banggai

2) Fasilitas Umum

Data mengenai fasilitas umum di Kecamatan Toili menunjukkan bahwa terdapat total 34 unit bangunan sekolah, mulai dari jenjang PAUD/TK hingga SMA, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Toili

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
PAUD / TK	-	9	9
SD	15	-	15
MI	-	1	1
SMP	4	-	4
MTs	2		2
SMA	-	2	2
SMK	1	1	2
MA	2	-	2
Total	24	13	37

3) Fasilitas Kesehatan

Data mengenai fasilitas kesehatan di Kecamatan Toili menunjukkan bahwa terdapat total 9 unit bangunan kesehatan, mulai dari Apotek hingga Poliklinik, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Toili

Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit	-
Klinik Bersalin	3
Poliklinik/Balai Pengobatan	1
Puskesmas Rawat Inap	-
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	-
Apotek	5
Total	9

4) Fasilitas Agama

Data mengenai fasilitas Agama di Kecamatan Toili menunjukkan bahwa terdapat total 40 unit tempat ibadah, mulai dari Masjid hingga Pura, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Jumlah Fasilitas Agama di Kecamatan Toili

Desa atau Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja Protetan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Ue Mea	1	-	1	-		
Samalore	1	1	1	-	-	-
Sidomukti	1	1	-	-	-	-
Mansahang	1	1	-	-	-	-
Benteng	1	-	1	-	-	-
Rusa Kencana	1	1	1	1	-	-
Cendana Pura	1	1	1	-	-	-
Kel. Cendana	1	1	1	-	-	-
Tanah Abang	1	1	-	-	-	-
Singkoyo	1	1	1	-	-	-
Jaya Kencana	1	1	-	-	1	-
Sentral Sari	1	1	1	-	-	-
Sentral Timur	1	1	-	-	1	-
Tirta Kencana	1	1	-	-	-	-
Tirta Sari	1	1	-	-	1	-
Jumlah	15	13	8	1	3	-

Sumber: BPS Kabupaten Banggai

c. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk mengolah lahan dan memanfaatkan sumber daya alam guna menghasilkan bahan pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya melalui budidaya tanaman dan/atau pemeliharaan hewan ternak. Pertanian mencakup berbagai aktivitas, mulai dari penanaman tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayuran, hingga hortikultura, perkebunan, peternakan, serta pengelolaan hasil pertanian. Selain berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, pertanian juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.

1) Luas Panen Tanaman Sayuran Semusim

Berikut ini disajikan data mengenai luas panen tanaman sayuran semusim berdasarkan jenis tanamannya yang terdapat di Kecamatan Toili:

Tabel 7
Jumlah Luas Panen Tanaman Sayuran Semusim

Jenis Tanaman	2.020	2.021	2.022	2023
Sayuran:				
Bawang Merah	—	—	—	—
Cabai Besar/TW/Teropong	—	—	—	—
Cabai Keiting	—	—	—	—
Cabai Rawit	16	58	62	35
Kentang	—	—	—	—
Kubis	—	—	—	—
Tomat	6	14	11	9
Bawang Putih	—	—	—	—

Sumber : BPS Kabupaten Banggai

2) Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Toili (Kuitai)

Berikut ini disajikan data mengenai produksi tanaman sayuran menurut jenis tanaman yang terdapat di Kecamatan Toili:

Tabel 8
Produksi Tanaman Sayuran

Jenis Tanaman		2.020		2.021		2.022		2023
Sayuran:								
Bawang Merah	—		—		—		—	
Cabai Besar/TW/Teropong	—		—		—		—	
Cabai Keiting	—		—		—		—	
Cabai Rawit	103		420		1.029		388	
Kentang	—		—		—		—	
Kubis	—		—		—		—	
Tomat	6		396		156		174	
Bawang Putih	—		—		—		—	

Sember: Kecamatan Toili dalam angka 2024

3) Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Toili (m²)

Berikut ini disajikan data mengenai luas panen tanaman Biofarmaka menurut jenis tanaman di Kecamatan Toili:

Tabel 9
Jumlah Luas Tanaman Biofarmaka

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023
Jahe		134.550	55.000	100.000
Laos/Lengkuas		—	1.500	-
Kencur		137.500	40.000	150.000
Kunyit		58.900	25.000	50.000

Sumber: Kecamatan Toili Dalam Angka 2024

4) Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Toili (kg)

Berikut ini disajikan data mengenai produksi tanaman Biofarmaka menurut jenis tanaman di Kecamatan Toili:

Tabel 10
Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023
Jahe	-	-	-	175.000
Laos/Lengkuas	-	-	-	-
Kencur	-	-	-	177.000
Kunyit	-	-	-	190.000

Sumber : Kecamatan Toili Dalam Angka 2024

BAB III

PEMERINTAH KECAMATAN

1. Visi dan Misi Kabupaten Banggai

Visi

Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal

Misi

- Membangun sumber daya manusia berkualitas, produktif, dan sejahtera
- Menciptakan kemandirian ekonomi yang produktif dan berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi
- Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur serta penanggulangan bencana
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis lingkungan
- Pengembangan pariwisata dan budaya serta nilai keagamaan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

2. Jumlah Aparatur Pemerintahan Kecamatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari aparatur negara yang berperan sebagai pelayan masyarakat atau pelayan publik. Tugas utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menjalankan fungsi negara, pemerintahan, dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mampu mencetak PNS yang kompeten dan berintegritas tinggi. Di lingkungan Pemerintah Kecamatan Toili, tercatat bahwa 64% PNS telah menempuh pendidikan pada jenjang Sarjana dan Diploma, sementara 36% lainnya masih berpendidikan setingkat SMA.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa dari 25 PNS di Pemerintah Kecamatan Toili, sebanyak 9 orang adalah PNS golongan II, sebanyak 14 orang golongan III, dan sebanyak 2 orang adalah golongan IV :

Tabel 11
Jumlah PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Presentase	Jumlah
1.	I	-	-
2.	II	36%	9
3.	III	56%	14
4.	IV	8%	2

Tabel 12
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Golongan	Presentase
1.	Tidak/belum tamat SD	-
2.	SD	-
3.	SLTP	-
4.	SMA	9
5.	Akademi	-
6.	Universitas	16
Jumlah		25

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banggai, Kecamatan Toili memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi yang dijalankan berdasarkan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut ini disampaikan uraian mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Toili.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1) Camat

Camat memiliki tugas penting sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, Camat bertugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan serta menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas tersebut meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian pelaksanaan kewenangan pemerintahan kabupaten di wilayah kerjanya, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, Camat berperan sebagai koordinator administratif yang menghubungkan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Oleh karena itu, peran Camat sangat vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif di tingkat lokal (Siregar, 2016). Dengan adanya pelimpahan

sebagian kewenangan, Camat dituntut memiliki kapasitas kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan yang mumpuni agar pelaksanaan pemerintahan di wilayah kecamatan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

2) Sekretaris Camat

Sekretaris Camat memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan di tingkat kecamatan melalui pengelolaan bidang kesekretariatan secara menyeluruh. Tugas utama Sekretaris Camat meliputi pelaksanaan administrasi umum, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat kecamatan, pemberian dukungan administratif, pengelolaan aset, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di berbagai bidang seperti kepegawaian, perencanaan, keuangan, dan evaluasi. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Kecamatan dibantu oleh dua Sub Bagian, yaitu:

3) Kepala Sub Bagian Umum, Aset, dan Kepegawaian

Memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung kelancaran fungsi administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Tugas utamanya meliputi memimpin dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi umum, pengelolaan aset daerah, serta manajemen kepegawaian. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian bertanggung jawab atas penyiapan bahan penyelenggaraan urusan administrasi, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan antarunit kerja, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan sumber daya manusia. Peran ini menjadi penting dalam memastikan tertib administrasi, efisiensi penggunaan aset daerah, dan optimalisasi kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Dalam praktiknya, Kepala Sub Bagian ini menjadi penghubung penting antara perencanaan teknokratis dan realisasi anggaran daerah, serta bertanggung jawab untuk menyajikan data evaluatif sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis kinerja. Peran ini diperkuat dengan prinsip good governance dan manajemen keuangan daerah yang akuntabel, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2018), bahwa sistem pengelolaan keuangan publik harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan. Dengan demikian, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi menjadi salah satu ujung tombak dalam membangun tata kelola pemerintahan kecamatan yang modern dan profesional.

4) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi

Memiliki fungsi strategis dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Tugas utama yang diemban mencakup memimpin dan melaksanakan kegiatan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan kecamatan. Hal ini mencakup pula penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan lintas bidang, serta pembinaan dan pengawasan dalam rangka memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, Kepala Sub Bagian ini menjadi penghubung penting antara perencanaan teknokratis dan realisasi anggaran daerah, serta bertanggung jawab untuk menyajikan data evaluatif sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis kinerja. Peran ini diperkuat dengan prinsip good governance dan manajemen keuangan daerah yang akuntabel, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2018), bahwa sistem pengelolaan keuangan publik harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan. Dengan demikian, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Evaluasi menjadi salah satu ujung tombak dalam membangun tata kelola pemerintahan kecamatan yang modern dan profesional.

5) Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertanggung jawab dalam mengarahkan serta mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan atau kelurahan. Tugas ini mencakup penyusunan bahan-bahan administrasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.

Selain itu, Kepala Seksi Pemerintahan juga berperan dalam mengoordinasikan lintas sektor guna memastikan sinergi antara lembaga pemerintahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh perangkat di bawahnya. Seluruh kegiatan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia).

6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Memimpin dan melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta desa atau

kelurahan merupakan tugas strategis yang mencakup beberapa aspek penting dalam tata kelola pemerintahan lokal. Kegiatan ini meliputi penyiapan bahan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengoordinasian antar pihak terkait, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan terhadap proses pemberdayaan. Seluruh aktivitas tersebut harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, aparatur pemerintahan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian dan pemberdayaan warga melalui perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal (Gunawan Sumodiningrat, 2009). Oleh karena itu, efektivitas pemberdayaan masyarakat dan desa sangat bergantung pada kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial di tingkat lokal.

8) Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata. Tugasnya mencakup memimpin dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, yang meliputi penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan urusan teknis pembangunan, penyusunan bahan untuk pengkoordinasian lintas sektor, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya. Seluruh tugas tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Pembangunan dituntut memiliki kompetensi teknis dan kemampuan manajerial dalam menyusun program-program prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu membangun koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Efektivitas fungsi ini sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kuncoro, 2013).

9) Seksi Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan

Kepala Seksi Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan memegang peranan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Tugas utama yang diemban meliputi memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan

publik, penyampaian informasi, serta penanganan pengaduan masyarakat. Lingkup kerja ini mencakup penyiapan bahan untuk penyelenggaraan urusan, penyusunan bahan koordinasi antarunit atau lembaga terkait, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan agar kegiatan pelayanan, informasi, dan pengaduan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, kepala seksi ini dituntut untuk mengelola saluran komunikasi publik secara efektif, menindaklanjuti laporan masyarakat secara profesional, dan membina aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima (Dwiyanto, 2006). Oleh karena itu, peran ini tidak hanya administratif, melainkan juga menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi kecamatan adalah susunan atau tatanan perangkat kerja yang berada di bawah pimpinan camat dan berfungsi untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Struktur ini menggambarkan hubungan kerja, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara unit-unit kerja yang ada di lingkungan kecamatan.

Berikut adalah struktur Kecamatan Toili:

- Camat : Andi Rustam Dj. Hi. Pettasiri, S.STP, M.Si
- Sekretaris Camat : Agung Prihatyanta, SP
- Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi : -
- Kasubag Umum, Aset dan Kepegawaian : Asgar Rahim, S.Sos
- Kasi Pemerintahan : Drs. Moh. Henik
- Kasi Pembangunan : Yetik Indrayani, S.Pd
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan : Suhartono, SP
- Kasi Pelayanan, Informasi, dan Pengajauan : Karningsih, SE
- Kasi Ketertiban dan Ketentraman Umum : Aman Anshari, S.Sos

DAFTAR PUSTAKA

- Banggai, B. K. (2023). *Kecamatan Toili Dalam Angka 2023*.
- Banggai, P. K. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan Toili Jaya*. Pemkab Banggai.
- BPS Kabupaten Banggai. (2024). *Kecamatan Toili Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Banggai.
- Dwiyanto. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Gunawan Sumodiningrat. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Husain. (2020). Dinamika Sosial Transmigran di Sulawesi Tengah: Studi Kasus di Kabupaten Banggai. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 2–27.
- Indonesia, K. D. N. R. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. (2015). *Sejarah Perkembangan Transmigrasi di Indonesia*. Kemendesa PDTT.
- Kuncoro. (2013). *Perencanaan Pembangunan: Teori dan Aplikasi*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Publisher.
- Negeri, K. D. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Siregar. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Daerah*. Gava Media.